



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL**

2025

LAPORAN KEUANGAN



DINAS PERHUBUNGAN KAB. BANTUL

Alamat : Komplek Pemda II

Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Telp/Fax. (0274)367321

Email : dishub@bantulkab.go.id, IG : @dishub_bantul

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2025 ini dengan lancar tanpa hambatan apa pun.

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2025 terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama 1 (satu) tahun anggaran.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama tahun 2025, di samping menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan ini. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Keuangan di tahun – tahun berikutnya.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya oleh semua pihak serta dapat mendukung berbagai unsur dalam rangka pengambilan keputusan.

Bantul, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul



SINGGIH RIYADI, S.E.,M.M
NIP 197307211997031007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	6
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR CAPAIAN TARGET KINERJA APBD	7
2.1. Ekonomi Makro.....	7
2.2. Kebijakan Keuangan.....	18
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD:	19
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL	35
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	35
3.2 Hambatan Dan Kendala.....	54
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	56
4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	56
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	58
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	58
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi	60
BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL	62
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing – Masing Pos Pelaporan	62
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	69
6.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	69
6.2 Sarana dan Prasarana pendukung	69
6.3 Pencapaian Kinerja Non Keuangan	71
BAB VII PENUTUP	73
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan Perangkat Daerah8

Tabel 2. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan10

Tabel 3. Perbandingan Anggaran Murni Dan Perubahan Tahun 202513

Tabel 4. Perbandingan Program Kegiatan Dan Anggaran 2024 - 2025 ...18

Tabel 5. Target Pencapaian Kinerja Data Laporan Penyelenggaraan
Program Kegiatan Dinas Perhubungan Kab Bantul 202521

Tabel 6. Target Dan Realisasi Pendapatan Masing-Masing65

Tabel 7. Anggaran Dan Realisasi Belanja Operasi66

Tabel 8. Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal66

Tabel 9. Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 202568



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

വിനയം

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul ☎ (0274) 367321
Website: <http://dishub@bantulkab.go.id>, Email: dishub@bantulkab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 31 Desember 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL**



SINGGIH RIYADI, S.E.,M.M
NIP 197307211997031007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Bantul, salah satunya Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Untuk itu di akhir tahun anggaran Bupati meminta Kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang telah dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) tetapi berupa Laporan Keuangan.

Selama 1 (satu) tahun anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi telah menyelenggarakan sistem akuntansi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menjadi kewenangannya dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyusun Laporan Keuangan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, Neraca selaku Pengguna Barang, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Adapun maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ini adalah :

1. Menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama satu periode laporan.

2. Untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan :
 - a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.
 - c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam hal ini adalah :
 - pihak – pihak kepada siapa pemerintah bertanggung jawab
 - wakil rakyat dan lembaga pengawas
 - manajemen dan aparat pemerintah
 - pihak yang memberi/berperan dalam proses pemberian bantuan
 - pihak lain yang berkepentingandalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :
2. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang – undangan.
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil – hasil yang telah dicapai.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya.
6. Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode laporan.
8. Untuk memenuhi tujuan – tujuan tersebut Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama 1 (satu) tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disusun dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

- a. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang- undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang- undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang- undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- e. Undang- undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- j. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- k. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 5 tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan;
- p. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- q. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan TA 2025

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
- Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

EKONOMI MAKRO

2.1. Ekonomi Makro

Dari tahun ke tahun secara umum kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta khususnya semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator, yaitu meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Kondisi ini tentunya membawa konsekuensi terhadap kebutuhan fasilitas pendukung seperti prasarana jalan beserta kelengkapan keselamatan lalu lintasnya.

Kondisi jalan – jalan di Kabupaten Bantul secara bertahap mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari kondisi jalan yang ada mayoritas sudah dalam kondisi mantap, namun fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas yang tersedia kiranya masih perlu mendapat perhatian. Hal ini terlihat dari jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah Bantul menurut informasi dari Polres Bantul masih cukup tinggi, meskipun mayoritas kasus terjadi karena faktor manusia.

Secara ideal peningkatan jalan seyogyanya diikuti dengan fasilitas lalu lintas yang memadai untuk mendukung keselamatan, keamanan dan kenyamanan lalu lintas seperti LPJU, rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, flashing lamp, pagar pengaman jalan, halte dan sebagainya. Pemenuhan terhadap kebutuhan fasilitas tersebut setiap tahun masih terbatas sehingga dari sisi kuantitas dan kualitas prasarana belum memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul serta mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul,

disusunlah perencanaan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Renstra – SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul) sesuai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantul sejak tahun 2021 berpedoman pada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Mengacu pada dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, tujuan dan sasaran pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai adalah :

- 1. Tujuan : Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia dalam berlalu lintas
- 2. Sasaran : Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaen Bantul Tahun 2025:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya keselamatan lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

		Peningkatan keselamatan transportasi	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu)Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 2. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri 3. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis 4. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Adiministrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat

			Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Bebrbaisi Elektronik pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dians Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2. Pengadaan, Pemasangan,

			Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 3. Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 mengalami perubahan anggaran sehingga mengalami penurunan anggaran atau efisiensi di Tahun 2025 sebesar Rp. 996.168.131,- Berikut Perbandingan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta alokasi Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3. Perbandingan Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan
Tahun 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Murni	Perubahan	Tambah/Kurang
PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	900.000.000	230.400.000	(669.600.000)
		2. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	800.000.000	144.000.000	(656.000.000)
		3. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis	1.280.000.000	201.600.000	(1.078.400.000)
		4. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto- Pleret	2.540.000.000	144.000.000	(2.396.000.000)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.360.000	13.160.000	(4.200.000)
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.250.000	94.250.000	0

KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.509.691.289	6.802.291.658	292.600.369
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.480.000	136.680.000	4.800.000
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.999.900	19.891.900	(108.000)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	9.999.000	9.999.000	0
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.999.900	74.999.900	50.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.973.100	5.973.100	0
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.243.980	108.883.080	(4.360.900)
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.998.700	11.998.700	0
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	182.431.508	182.431.208	(300)
		5. Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	0
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.460.000	32.695.000	(19.765.000)
		7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	10.000.000	0
		8. Dukungan pelaksanaan Sistem	190.999.000	190.999.000	0

		Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.652.792 97.800.000 64.830.000 426.434.028	89.652.792 93.800.000 68.790.000 447.474.940	0 (4.000.000) 3.960.000 21.040.912
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.523.300 250.280.500 14.969.200	111.522.200.000 280.20.400 279.409.088	9.998.900 29.922.900 264.439.888

PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	17.067.584.384	18.606.200.384	1.538.616.000
		2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.905.596.280	2.942.403.780	1.036.807.500
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	435.214.015	435.214.015	0
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	86.600.000	86.600.000	0
		2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	367.714.200	374.514.000	6.799.800
		3. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7.250.000	7.250.000	0
		4. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	109.770.000	84.750.000	(25.020.000)
		5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	750.902.858	1.175.902.858	425.000.000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	193.967.388	193.967.388	0
		2. Pengadaan dan Pemasangan	1.181.981.530	1.521.481.630	339.500.100

		Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
JUMLAH			37.661.050.113	36.664.881.982	(996.168.131)

Perbandingan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran antara tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025
Program	2	3
Kegiatan	13	14
Subkegiatan	38	41
Anggaran Murni	29.853.583.606	37.661.050.131
Anggaran Perubahan	34.493.554.253	36.664.881.982

Tabel 4. Perbandingan program kegiatan dan anggaran antara tahun 2024 dan tahun 2025

2.2.Kebijakan Keuangan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak. Untuk dapat melaksanakan tupoksi tersebut secara lancar dibutuhkan kebijakan pengelolaan dana (anggaran) yang telah dialokasikan sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mengacu pada kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, antara lain :

2.1.Pengelolaan keuangan yang mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan, antara lain :

- a. Tertib, efektif, efisien, ekonomis

- b. Taat pada peraturan perundangan yang berlaku
 - c. Transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan
- 2.2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja
- 2.3. Semua transaksi keuangan baik penerimaan daerah maupun pengeluaran dicatat, dibukukan, dilaporkan serta dilaksanakan melalui kas daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Indikator pencapaian target kinerja APBD Dinas telah ditetapkan pada saat penyusunan awal program, sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaannya. Penetapan indikator kinerja ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam rangka pengukuran kinerja. Terdapat beberapa indikator kinerja yang digunakan yaitu indikator masukan (inputs), indikator keluaran (outputs), indikator hasil (outcomes), indikator manfaat (benefits), indikator dampak (impacts).

Penetapan indikator kinerja ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja ini bersifat :

1. Spesifik dan jelas
2. Dapat diukur secara obyektif, baik kuantitatif maupun kualitatif
3. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
4. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan
5. Dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara efisien dan efektif.

Di samping itu ada beberapa karakteristik indikator kinerja yang baik antara lain :

1. Terikat pada tujuan program dan menggambarkan pencapaian hasil

2. Terbatas pada hal – hal yang vital dan penting bagi pengambilan keputusan
3. Terpusat pada hal – hal yang perlu mendapat prioritas
4. Terkait dengan sistem pertanggungjawaban yang memperhatikan hasil.

Selain penetapan indikator kinerja, pada awal program ditetapkan pula pengukuran kinerja untuk mengetahui efektifitas kinerja yang dihasilkan. Pengukuran kinerja ini digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi kinerja. Tahapan ini dimulai dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kebijaksanaan didasarkan nilai capaian kinerja kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilihat dari penyerapan anggaran terhadap kegiatan yang diselesaikan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2025, maka diperoleh hasil **sebesar 96,99% kategori sangat berhasil.**

Secara umum pada tahun 2025 program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun demikian dari sisi anggaran secara keseluruhan masih terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.104.300.133,- (Satu milyar seratus empat juta tiga ratus ribu serratus tiga puluh tiga rupiah).**

Adapun target pencapaian kinerja data laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. Target Pencapaian Kinerja Data Laporan Penyelenggaraan Program Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Tahun 2025**

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	230.400.000	230.400.000	1. Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 2. Jumlah APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang	1 (satu) Dokumen 8 (delapan) unit APJ Pintar	Capaian kinerja pemanfaatan tata ruang SRS tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	144.000.000	144.000.000	Jumlah APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang	5 Unit APJ Pintar	Capaian kinerja pemanfaatan tata ruang SRS tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	201.600.000	201.600.000	1. Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis 2. Jumlah APJ Pintar	1 (satu) Dokumen 7 (delapan) unit APJ Pintar	Capaian kinerja pemanfaatan tata ruang SRS tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
					Bernuansa Budaya yang terpasang			
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	144.000.000	144.000.000	1. Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kerto Pleret 2. Jumlah APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang	1 Dokumen : 5 Unit APJ Pintar	Capaian kinerja pemanfaatan tata ruang SRS tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.160.000	12.990.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	Capaian Kinerja Perencana an dan Evaluasi Perangkat Daerah	98.71
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.250.000	79.250.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Capaian Kinerja Perencana an dan Evaluasi Perangkat Daerah	84.08

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.802.291.658	6.295.490.456	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	92,55
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	136.680.000	124.080.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	90.78
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.891.900	19.591.900	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	5 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	98.49

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.999.000	9.999.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	99,19
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74.999.900	74.499.900	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	99.33
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.973.100	5.973.100	Jumlah paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.883.080	108.873.900	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	99,99

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.998.700	11.998.700	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	182.431.208	181.631.200	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	99,56
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.695.000	32.570.169	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	99,62
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.500	9.955.500	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	99.55

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	190.999.000	190.516.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	99,75
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.652.792	89.652.792	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.800.000	93.382.097	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	99.55
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.790.000	51.290.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	74.56

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	447.474.940	424.101.032	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	94.78
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.522.200	111.401.300	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	99,87
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.203.400	280.108.674	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	99.97

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.409.088	278.727.900	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	99,76
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18.606.200.384	18.265.202.477	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1.073 Unit (955 PJU dan 118 Cermin tiukung)	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	98.17
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.942.403.780	2.870.736.466	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.725 Unit	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	97.56

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang)	435.214.015	434.675.731	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	99,88
10	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	86.600.000	86.600.000	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	9.522 Unit dari 11.113 Unit	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	100
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	374.514.000	367.398.482	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.036 Dokumen dari 10.000 Dokumen	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	98,10

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7.250.000	7.250.000	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	100
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	84.750.000	84.750.000	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	100
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.175.902.858	1.164.188.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	99

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
11	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	193.967.388	179.697.388	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	92.78
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.521.481.630	1.511.761.748	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	256 Unit	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	99,36
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	416.714.300	408.159.300	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	97.95

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	552.665.168	529.160.470	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	95.75
12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	187.254.797	186.684.471	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	99,70

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
13	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	275.408.396	238.513.896	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Persentase Angkutan umum orang dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bantul	86.60
14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	9.449.800	9.449.800	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang - undangan	100

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
Jumlah			36.664.881.982	35.560.581.849				96,99%



Mengetahui
Pengguna Anggaran

SINGGIH RIYADI, S.E.,M.M
NIP 197307211997031007

Bantul, 31 Desember 2025

Pejabat Penatausahaan Keuangan



Mochamad Yenni, S.Kel., M.Si
NIP 198309052010011013

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas

Secara umum ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat disampaikan sebagai berikut :

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN
YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung tata ruang dalam urusan keistimewaan agar menciptakan Daerah Istimewa Yogyakarta yang moden namun tetap berpijak pada akar budayanya. Anggaran yang dialokasikan atau dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 720.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 720.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh juta rupiah) atau sebesar 100%.

KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG
STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub kegiatan :

1. Sub kegiatan Pemanfaatan Ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis

Anggaran yang dialokasikan atau dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.230.400.000 (Seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.230.400.000 (Seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 100%. Keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 1 dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis dan 8 unit APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang.

2. Sub kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

Anggaran yang dialokasikan atau dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 144.000.000 (Seratus empat puluh empat juta rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 144.000.000 (Seratus empat puluh empat juta rupiah) atau sebesar 100%.

Keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 1 dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri dan 5 unit APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang

3. Sub kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis.

Anggaran yang dialokasikan atau dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 201.600.000 (Rp Dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 100%

Keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 1 dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis dan 7 unit APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang.

4. Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret

Anggaran yang dialokasikan atau dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 144.000.000 (Rp Seratus empat puluh empat juta rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 144.000.000 (Rp Seratus empat puluh empat juta rupiah) atau sebesar 100%.

Keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 1 dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kerto Pleret dan 5 unit APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Kebijakan program, kegiatan, dan subkegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai visi dan misi dinas. Anggaran yang dialokasikan atau

dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar **Rp. 9.075.105.466,-** (Sembilan milyar tujuh puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 8.496.083.620,-** (Delapan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 93.62%.

Sampai dengan akhir tahun semua kegiatan dalam program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sehingga capaian kinerja atau target output – out come dapat tercapai.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan.

1. **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** ditujukan untuk makan minum pelaksanaan rapat koordinasi, evaluasi RUP dan Forum PD. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 13.160.000,- (Tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 13.160.000,- (Tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau 98,71%. Keluaran / output dari sub kegiatan ini yaitu 7 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 94.250.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta dua ratus lima puluh Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 94.250.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta dua ratus lima puluh Rupiah) atau 84,08%. Keluaran / output yaitu ditujukan untuk pembayaran honorarium 2 (dua) tenaga pembantu Non ASN di Sub bagian Program dan Keuangan. Keluaran / output dari sub kegiatan ini yaitu 7 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yang terdiri dari:

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** yang diperuntukkan untuk pembayaran gaji ASN serta tunjangan

kinerja ASN. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 6.802.291.658,- (Enam milyar delapan ratus dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 6.295.490.456,- (Enam milyar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh enam Rupiah) atau 92,55%. Realisasi Keluaran / output dari sub kegiatan ini yaitu 45 orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.

3. **Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.** Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan guna untuk mendukung kegiatan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 136.680.000,- (Seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan terealisasi Rp 124.080.000,- (Seratus dua puluh empat juta delapan puluh ribu Rupiah) atau 90,78%. Realisasi Keluaran / output dari sub kegiatan ini yaitu 4 Dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

2. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan** Akhir Tahun SKPD ditujukan untuk Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka penyusunan dokumen laporan kegiatan dinas antara lain : RKT, PPS, PKK, Laporan Triwulan, Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan LAKIP, Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan. Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, semua laporan tersusun sesuai rencana. Selain itu digunakan untuk bahan cetak dan makan minum rapat. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.891.900,- (Sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah) dan terealisasi Rp. 19.591.900,- (Sembilan belas juta luma ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah) atau 98,49

% Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 5 Dokumen Laporan Keuangan dan Aset.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua sub kegiatan) yang terdiri dari:

1. **Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai**, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan makan minum rapat dan fotocopy. Anggaran yang dialokasikan Rp. 9.999.900,- (Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah) dan terealisasi Rp. 9.999.900,- (Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah) atau 100%. Realisasi keluaran / output dari sub kegiatan ini yaitu 5 dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai.
2. **Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan** pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja bidang perhubungan yaitu pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pegawai asn dan non asn tahun 2025 sebanyak 2 kali. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 74.999.900,- (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 74.499.900,- (Tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus Rupiah) atau 99,33 %. Realisasi keluar / output dari sub kegiatan ini yaitu 100 orang yang mengikuti Bimtek Implementasi peraturan undang-undangan. Hasil dari bimtek tersebut tingkat pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 8 (Delapan) sub kegiatan yang meliputi:

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** ditukuan untuk pengadaan belanja alat listrik (Fitting, Kabel, Lampu LED,

Lampu TL, Stop kontak).Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.973.100,- (Lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.973.100,- (Lima juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus Rupiah) atau 100%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 4 paket komponen instalasi listrik.

2. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** ditujukan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (alat tulis kantor, kertas, cover, bahan-bahan computer, isi tabung pemadam, pakaian olah raga, karangan bunga, almari , peralatan personal computer/printer dan belanja penghancur kertas). Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 108.883.080,- (Seratus delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 108.873.900,- (Seratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) atau 99,99 %. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 9 paket pengadaan peralatan perlengkapan kantor.
3. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** ditujukan untuk pembelian bahan peralatan kebersihan dan bahan kebersihan serta tabung gas elpigi. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 11.998.700,- (Sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 11.998.700,- (Sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah) atau 100%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 3 paket peralatan rumah tangga dan perlengkapan kantor.
4. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** ditujukan untuk penggandaan dokumen, amplop berkop dinas, bend.26, cetak banner dan publikasi media cetak. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 182.431.208,- (Seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 181.631.200,- (Seratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus Rupiah) atau

99,56%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 3 paket barang cetakan dan pengandaan.

5. **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu** digunakan untuk makan minum jamuan tamu yang dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta Rupiah) atau 100 %. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 20 laporan fasilitasi kunjungan tamu.
6. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** ditunjukan untuk makan minum rapat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 32.695.000,- (Tiga puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 32.570.169,- (Tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu serratus enam puluh sembilan Rupiah) atau 99,62%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 25 Dokumen laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi seperti laporan hasil rapat, laporan penerimaan tamu, laporan hasil perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
7. **Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** ditujukan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Kearsipan seperti belanja kertas dan cover, belanja cetak dan rapat koordinasi kearsipan di Dinas Perhubungan tahun 2025. Anggaran Dialokasikan sebesar Rp. 10.000.500,- (Sepuluh juta lima ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 9.955.500,- (Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus Rupiah) atau 99,55 %. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 4 dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
8. **Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD** ditujukan untuk melaksanakan kegiatan belanja cetak dan jasa pengadaan System Informasi Smart Dinas Perhubungan/ profil dishub, Sistem Informasi Angkutan “Siang Malam”,

SALUD DIGITAL dan Sistem Informasi Pengendalian Internal. Anggaran dialokasikan sebesar Rp. 190.999.000,- (DSeratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 190.516.000,- (Seratus Sembilan puluh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) atau 99,75% Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 2 dokumen.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yang meliputi:

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat** ditujukan untuk pembayaran honorarium tenaga non asn administrasi persuratan dan benda pos/materai. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 89.652.792,- (Delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 89.652.792,- (Delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 100%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 1 dokumen laporan kegiatan persuratan.
2. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** yang ditujukan untuk pembayaran rekening listrik dan telepon 12 bulan dan Pelaksanaan BCE 2025 (Bantul Creative Expo). Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 93.800.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 93.382.097,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah) atau 99,55%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 1 dokumen laporan pembayaran rekening listrik dan telepon.
3. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** ditujukan untuk pengadaan Jasa Tenaga Non ASN, transport survei pendataan aset perlengkapan jalan, Pemeliharaan peralatan kantor dan

peralatan rumah tangga. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 68.790.000,- (Enam puluh delapan juta ujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 51.290.000,- (Lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau 74,56%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 2 dokumen laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

4. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** ditujukan untuk pembayaran jasa tenaga non asn keamanan dan kebersihan, iuran jaminan kesehatan, JKK JKM untuk pegawai non asn, belanja atribut, sepatu dinas dan fotocopy. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 447.474.940,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 424.101.032,- (Empat ratus dua puluh empat juta seratus satu ribu tiga puluh dua rupiah) atau 94,78%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 5 dokumen laporan seperti laporan keamanan dan ketertiban kantor, laporan kegiatan administrasi umum, laporan perawatan kendaraan, laporan pengelolaan BMD, laporan premi asuransi.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga sub kegiatan) yaitu:

1. **Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan** yang ditujukan untuk bahan bakar minyak (BBM), pajak kendaraan, Pemeliharaan kendaraan dan suku cadang yang dialokasikan sebesar Rp. 111.522.200,- (Seratus sebelas juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 111.401.300,- (Seratus sebelas juta empat ratus satu ribu tiga ratus rupiah) atau 99,89%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 16 unit kendaraan dinas jabatan terpelihara dengan baik.

2. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan** yang ditujukan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), jasa servis bus, KIR kendaraan Operasional, Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Kendaraan dan pajak kendaraan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 280.203.400,- (Dua ratus delapan puluh juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 280.108.674,- (Dua ratus delapan puluh juta seratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 99,97 %. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 18 unit kendaraan dinas jabatan terpelihara dengan baik.
3. **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** ditujukan untuk belanja bahan-bahan bangunan dan kontruksi atap tempat wudhu, talang saluran pembuangan air, penecatan kantor UPTD PKB, pembangunan ruang ATCS, jasa konsultan pengawas ruang ATCS. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 279.409.088,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah) dan terealisasi Rp. 278.727.900,- (Seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) atau 99,76%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 2 unit Gedung kantor terpelihara dengan baik.

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Program ini terdiri 7 (tujuh) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan. Kebijakan program, kegiatan, dan subkegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai visi dan misi dinas. Anggaran yang dialokasikan atau dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 26.869.776.516,- (Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) dan dapat terealisasi

sebesar Rp. 26.344.498.229,- (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 98.05 %. Sampai dengan akhir tahun semua kegiatan dalam program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sehingga capaian kinerja atau target output – out come dapat tercapai.

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua sub kegiatan) yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Maksud sub kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan jalan yang memadai. Tujuan sub kegiatan ini adalah pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten. Anggaran ini ditujukan untuk pembayaran jasa tenaga non asn, bahan cetak, belanja makan minum, honorarium pengadaan barang jasa, belanja jasa non kontruksi, Belanja Modal jaringan listrik lainnya, belanja modal rambu-rambu lalu lintas lainnya, konsultan perencana dan konsultan pengawas LPJU. Pagu anggaran sub kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp. 18.606.200.384,- (Delapan belas milyar enam ratus enam juta dua ratus ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dan terealisasi Rp. 18.265.202.477,- (Delapan belas milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau 98.17%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 1.073 unit perlengkapan jalan terpasang seperti Cermin tikung 118 unit dan LPJU 955 unit di wilayah Kabupaten Bantul.

2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pagu anggaran sub kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp. 2.942.403.780,- (Dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

dan terealisasi Rp. 2.870.736.466,- (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) atau 97,56%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa bahan cetak, pembayaran jasa tenaga non asn, belanja alat listrik, honor pengadaan barang & jasa dan belanja modal jaringan listrik lainnya. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 2.725 unit perlengkapan jalan ter rehabilitasi dan terpelihara dengan baik.

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

1. **Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)** bertujuan tersedianya simpul transportasi yang memadai guna untuk melayani angkutan orang dalam trayek yang lebih baik. Kegiatan ini meliputi belanja jasa tenaga non asn, sewa tanah, belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi, belanja honor pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan gedung dan bangunan dan pemeliharaan halte bus yang nyaman bagi pengguna angkutan,

Dinas Perhubungan kab. Bantul memiliki 3 Terminal yang masih beroperasi, yaitu :

1. Terminal Palbapang
2. Terminal Imogiri dan
3. Terminal Parangtritis

Fasilitas publik ini seiring dengan perkembangan kondisi, sangat membutuhkan fasilitas pemeliharaan dan rehabilitasi atas sarana dan prasarannya. Di Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kab. Bantul menganggarkan fasilitas pemeliharaan dan rehabilitasi untuk terminal type C di Bantul sebesar Rp. 435.214.015,- (Empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat belas ribu lima belas rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 434.675.731,- (Empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 99,88%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 3 unit terminal dan

halte bus di wilayah Kabupaten Bantul terehabilitasi dan terpelihara dengan baik.

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Maksud dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor untuk kendaraan Wajib Uji Di Kabupaten Bantul sesuai dengan UU no. 22 Tahun 2009. Adapun tujuan dari Pengujian berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan di jalan.
- Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan
- Memastikan kendaraan memenuhi standar kelayakan jalan
- Memberikan pelayanan umum pada masyarakat.

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Maksud kegiatan ini adalah tersedianya sarana administrasi pendukung kegiatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor untuk penyediaan formulir register uji dan gaji tenaga non ASN. Indikator keluaran Sub Kegiatan ini adalah jumlah kendaraan wajib uji berkala yang terdaftar. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas adalah sebesar Rp. 86.600.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 86.600.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah) atau sebesar 100%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 11.113 unit kendaraan wajib uji berkala.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Maksud kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana Bukti Hasil Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Indikator keluaran/output Sub Kegiatan ini adalah jumlah dokumen Bukti Lulus Uji Kendaraan bermotor. Adapun realisasi bentuk kegiatan ini adalah belanja kartu Smart Card, jasa tenaga non ASN, bahan kimia, ATK, kertas dan cover, surat keterangan tidak lulus uji.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas adalah sebesar Rp. 374.514.000,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 367.398.482,- (Tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) atau sebesar 98.10%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 10.000 dokumen bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

3. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Adapun Bentuk Kegiatan ini adalah Sosialisasi dengan Peraturan Tentang pengujian Kendaraan Bermotor kepada pengusaha angkutan dan warga masyarakat pengguna layanan uji kendaraan bermotor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas adalah sebesar Rp. 7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar 7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 100%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 2 dokumen laporan kegiatan sosialisasi SOP pengujian kendaraan bermotor.

4. Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Adapun Bentuk Keegiatannya adalah Pendataan Potensi jumlah kendaraan wajib uji di kab. Bantul Indikator keluaran Sub Bagian ini adalah Jumlah Kendaraan yang teridentifikasi dan potensi jumlah kendaraan bermotor Wajib Uji. Bentuk realisasi dari anggaran ini berupa makan minum petugas penguji kendaraan bermotor di UPTD PKB. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 84.750.000,- (Delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 84.750.000,- (Delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 100%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 1 laporan pendataan wajib uji kendaraan bermotor.

- 5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.** Adapun bentuk kegiatan pada sub kegiatan ini adalah Pemeliharaan Alat Uji kendaraan bermotor sejumlah 11 unit serta Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor. Hal ini sangat diperlukan mengingat jumlah wajib uji di Kabupaten Bantul yang cukup banyak sehingga akurasi alat uji perlu dipertahankan. Indikator Keluaran Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara. Selain itu bentuk realisasinya berupa belanja pemeliharaan printer, belanja play detektor, belanja alat kepekaan kaca, pemeliharaan alat uji kendaraan/servis alat uji. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.175.902.858,- (Satu milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp 1.164.188.000,- (Satu milyar seratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau 99%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 11 unit peralatan uji kendaraan bermotor terpelihara dengan baik.

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

1. **Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.** Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 193.967.388,- (Seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 179.967.388,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan

rupiah) atau 92,78%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), bahan cetak, makan minum rapat kegiatan Andalalin dan jasa tenaga non ASN. Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan pada tahun 2025 sebanyak 17 (tujuh belas) dokumen standar teknis. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 3 Dokumen laporan penataan MRLL berupa dokumen rencana umum keselamatan lalu lintas tingkat kabupaten, dokumen survei lalu lintas dan dokumen kajian intervensi dan perencanaan rehabilitasi APILL.

2. **Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan** dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas keselamatan lalu lintas. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.521.481.630,- (Satu Milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.511.761.748,- (Satu milyar lima ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah) atau 99,36%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 256 unit pengadaan terdiri dari pengadaan marka 136 m², Speed bump 24 m, ZOSS 3 paket, Sparepart rambu LL 94 unit, sparepart Apill 4 unit, RPPJ 41 unit, rambu LL 55 unit, ZOSS PIK 1 unit, Speed bump 33 m, flashing lamp 1 paket dan rambu lalu lintas 90 unit.

3. **Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.**

Keluaran/output dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas, belanja bahan cetak dan kegiatan safety riding. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah 3 dokumen pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 416.714.300,- (Empat ratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) terealisasi Rp. 408.159.300,- (Empat ratus aadelapan juta seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus rupiah) atau 97,95%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 3 dokumen laporan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan di Kabupatean Bantul.

4. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/kota.

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Jasa tenaga non ASN, makan minum rapat, transport aktivitas lapangan, rompi parkir, sewa gedung PT. KAI, Sewa tenda posko lebaran 2025 dan Kegiatan Pengamanan dan wasdal parkir. Wasdal parkir dilaksanakan untuk parkir Tepi jalan umum dan Parkir Khusus. Adapun jumlah parkir tepi jalan umum Tahun 2025 sebanyak 94 lokasi dan Jumlah parkir khusus Tahun 2025 sebanyak 33 lokasi. Kegiatan PPNS pada Tahun 2025 sebanyak 13 kali, Wasdal parkir dilaksanakan sebanyak 263 kali pada Tahun 2025 dan kegiatan pam pengamanan sebanyak 182 kali.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 552.665.168,- (Lima ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus enam pouluh delapan rupiah) dan terealisasi Rp. 529.160.470,- (Lima ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) atau 99,75%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 4 laporan pengawasan dan pengendalian seperti laporan kegiatan pengendalian dan operasi, laporan ppembinaan operasional LLAJ, laporan peminaan parkir dan laporan safety riding.

Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Maksud dari sub kegiatan ini adalah tersedianya simpul transportasi yang memadai guna pelayanan angkutan orang dalam trayek yang lebih baik di jalan kabupate/kota. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa jasa tenaga non asn, bahan cetak, survey, makan minum rapat, transport aktivitas lapangan , makan minum aktivitas lapanganan dan jasa konsultasi penelitian.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 187.254.797,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 186.684.471,-(Seratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 99,7%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 3 dokumen laporan pengendalian dan pengawasan angkutan umum seperti laporan data angkutan dan laporan pengendalian pengawasan ketersediaan angkutan umum.

Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Sub kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud dari sub kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan. Tujuan Kegiatan Ini Adalah Tersedianya Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Jasa tenaga non ASN
- Transport pengemudi dan pendamping bus sekolah;

- Kegiatan Sosialisasi Keselematan Lalu Lintas dan Angkutan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) sebanyak 17 kali kegiatan
- Kegiatan Sosialisasi Keselematan Lalu Lintas dan Angkutan sebanyak 13 kali kegiatan.

Adapun anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 275.408.396,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 238.513.896,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 86,60%. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 2 dokumen laporan regulasi dan laporan sosialisasi rencana umum jaringan trayek.

Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

Maksud dari sub kegiatan Ini Adalah Kegiatan pembinaan yang ditujukan untuk para pengelola kios di terminal Palbapang dan Imogiri yang terdaftar sejumlah 63 Orang dan dilaksanakan selama 2 Kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan, mengingat para pengelola kios di 2 terminal (Palbapang dan Imogiri), menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Hasil dari kegiatan ini meliputi Laporan Fasilitas Perijinan 1 dokumen yaitu laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek selain itu digunakan untuk makan minum aktivitas lapangan dan bahan cetak. Adapun anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 9.449.800,- (Sembilan juta empat

ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 9.449.800,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) atau 100 %. Realisasi keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu 1 laporan fasilitas pelayanan perijinan bidang perhubungan.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk Dinas Perhubungan, sesuai Dokumen DPPA – SKPD tahun 2025 sebesar **Rp. 36.664.881.982,-** (Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar **Rp. 35.560.581.849,-** (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.104.300.133,-** (Satu Milyar Serratus Empat Juta Tiga Ratus Ribu Serratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar **96,99%**

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Beberapa hambatan dan kendala yang masih sering dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain :

1. Terbatasnya kemampuan SDM. Kualitas SDM di semua bidang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas yang semakin kompleks teratasi dan selesai tepat pada waktunya, sedangkan dalam hal kuantitas masih sangat diperlukan mengingat volume pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul semakin banyak.
2. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas sehingga masih sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional seperti mobil operasional yang memadai, sepeda motor,

sarana komunikasi, peralatan komputer yang perlu di perbaharui dan perlengkapan keselamatan, menyebabkan kurangnya optimalisas kinerja dinas.

4. Pertumbuhan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang tidak diimbangi dengan daya dukung jalan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Bantul yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan wajib di bidang perhubungan.

Sedangkan tugas pokok dan uraian tugas secara dirinci diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Sementara landasan operasional lain yang digunakan dalam pelaksanaan tugas tugas teknis antara lain Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan urusan Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan, SK Dirjen dan sebagainya.

Berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 21 tahun 2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan entitas akuntansi adalah SKPD sedangkan yang disebut entitas pelaporan adalah SKPKD. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (*accounting entity*) pada dasarnya menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola.

Sementara itu dalam UU nomor 1 tahun 2004 dijelaskan bahwa SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang nantinya akan digabungkan dengan entitas pelaporan.

Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang telah disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang terdiri dari pendapatan dan belanja serta realisasinya. Informasi ini dapat dianalisis dengan melihat selisih antara anggaran dan realisasinya atau melihat rasio – rasio antar rekening, misalnya rasio total belanja terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan dsb.

2. Laporan Operasional (LO)

Merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode.

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Neraca

Merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai kondisi atau posisi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada akhir tahun anggaran mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana.

5. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)

Laporan ini memberikan informasi mengenai berbagai hal yang tidak terbaca dari LRA, LO, LPE, dan Neraca. Laporan ini berisi

penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Laporan ini juga menjelaskan berbagai kebijakan, pendekatan, metode dan dasar penentuan dan penyajian angka – angka LRA dan Neraca di samping juga menjelaskan berbagai faktor, asumsi dan kondisi yang mempengaruhi angka – angka dalam Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul nomor 52 Tahun 2025 perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah : basis akrual.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos – pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Basis pengukuran atas penyusunan pos – pos laporan keuangan adalah :

1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas. Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab / dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP / TU yang per tanggal neraca belum disetor ke kas daerah. Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas bendahara tersebut (saldo

pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke kas daerah.

2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikan dan / atau pengurangannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara :

- a. biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya. Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan atau harga perolehan yang diestimasi.

4. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI).

EDL : selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek

EDI : kekayaan yang tertanam dalam investasi jangka panjang dan aset lainnya dikurangi jumlah kewajiban jangka panjang.

5. Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali

6. Belanja

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi beban daerah. Pengakuan biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi telah menyelenggarakan sistem akuntansi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menjadi kewenangannya dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyusun Laporan Keuangan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran,

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca selaku Pengguna Barang serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Namun demikian penerapan kebijakan akuntansi yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya didasarkan pada biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing – Masing Pos Pelaporan Keuangan

1. Pendapatan

Di samping mengelola belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul juga melaksanakan tugas sebagai dinas penghasil PAD. Beberapa retribusi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perijinan Tertentu dan Lain lain pendapatan yang sah. Adapun realisasi yang diperoleh dari masing – masing jenis retribusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan bersamaan dengan kegiatan masyarakat yang semakin kompleks akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi lalu lintas yang ada di sekitarnya. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pertama – tama dimaksudkan sebagai fasilitas pendukung untuk menjamin tercapainya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, selain itu juga telah membuka peluang bagi warga masyarakat untuk bergerak dalam perekonomian usaha jasa. Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi regulasi bagi penyelenggaraan tempat parkir sebagai kegiatan pelayanan umum akan menimbulkan beban biaya penyediaan jasa penyelenggaraan parkir yang semakin meningkat sehingga perlu diupayakan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya peraturan

yang mengatur tentang penyelenggaraan parkir beserta retribusinya, dalam hal ini retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah retribusi yang dipungut kepada wajib retribusi yang menyelenggarakan parkir dengan menggunakan badan jalan. Pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pemungutan retribusi ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 1 tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 06 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun target pendapatan dari retribusi parkir Parkir tepi jalan umum untuk tahun 2025 sebesar Rp. 278.960.000,- (Dua ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah). Sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebesar Rp. 374.210.000,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah) atau sebesar 134%.

b. Retribusi pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha (Terminal Palbapang dan Terminal Imogiri)

Retribusi pemakaian kios adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha, tempat kegiatan usaha fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pemungutan Retribusi pemakaian kios di Kabupaten Bantul diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 06 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum. Adapun target pendapatan retribusi kios terminal pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 187.173.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). Sampai dengan akhir Desember 2025 dapat terealisasi sebesar Rp.

204.992.100,- (Dua ratus empat juta Sembilan ratus Sembilan dua ribu serratus rupiah) atau sebesar 110%.

c. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir Perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan bersamaan dengan kegiatan masyarakat yang semakin kompleks akan menimbulkan permasalahan. Salah satunya adalah terpenuhinya ruang parkir yang berada di tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan publik.

Penyediaan tempat khusus parkir merupakan pelayanan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah berupa tanah atau bangunan. Dengan adanya keterbatasan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan ini maka pihak swasta dapat dilibatkan dalam pengelolaannya dengan menganut prinsip – prinsip komersial.

Dalam rangka menjalankan fungsi regulasi dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah yang dipakai tempat khusus parkir sebagai kegiatan pelayanan umum, ditempuh dengan meningkatkan peran partisipasi masyarakat pengguna jasa parkir. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan parkir beserta retribusinya, dalam hal ini retribusi tempat khusus parkir. Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta. Adapun target pendapatan dari retribusi parkir Khusus untuk tahun 2025 sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebesar Rp. 329.020.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 132%.

d. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Bus)

Adapun target pendapatan dari retribusi pemakaian kendaraan Bermotor (BUS) untuk tahun 2025 Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan akhir tahun dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) atau 20 %.

Berikut disajikan secara ringkas mengenai target dan realisasi pendapatan dari masing – masing jenis retribusi di atas.

Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	278.960.000	374.210.000	134
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	250.000.000	329.020.000	132
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Usaha / kios di Terminal Imogiri dan Palbapang	187.173.000	204.992.100	110
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bus	5.000.000	1.000.000	20
Denda Retribusi Pengujian	7.500.000	-	-
Jumlah	728.633.000	909.222.100	

Tabel 6. Target Dan Realisasi Pendapatan Masing-Masing Jenis Retribusi

2. Belanja

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 36.664.881.982,-** (Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar **Rp. 35.560.581.849** (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

2.1 Belanja Operasi

Pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk belanja operasi sebesar Rp. 15.331.966.982,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 14.553.767.898,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 94,92%.

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	6.802.291.658	6.295.490.456
2	Belanja Barang dan Jasa	8.529.675.324	8.258.277.442
Jumlah		15.331.966.982	14.553.767.898

2.2 Belanja Modal

Pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 21.332.915.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah). Sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 21.006.813.951,- (Dua Puluh Satu Milyar Enam Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau 98,47%.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.691.776.000	2.676.202.940
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	301.164.000	300.877.000

3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.339.975.000	18.029.734.011
Jumlah		21.332.915.000	21.006.813.951

Dari keseluruhan belanja modal tersebut menghasilkan aset tetap sebesar Rp. 21.006.813.951,- (Dua Puluh Satu Milyar Enam Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peralatan dan Mesin : Rp. 2.676.202.940,-
- b. Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 18.029.734.011,-
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 300.877.000,-

3. Aset

Jumlah keseluruhan aset baik aset lancar maupun aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

a. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Persediaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 baik Kas di Bendahara Pengeluaran maupun Kas di Bendahara Penerimaan **tidak ada sisa kas**. Sedangkan untuk persediaan terdapat sisa persediaan sebesar Rp. 937.825.891 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

b. Aset Tetap

Sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat tambahan aset tetap yang berasal dari hibah lampu penerangan jalan dari Kementerian ESDM sebesar Rp. 2.074.353.326,- (Dua milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah). Berikut hasil pengadaan Barang Milik Daerah tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul :

Tabel 9. Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2025

No.	Nama	Jumlah
1.	Peralatan dan Mesin	2.496.173.780,-
2.	Gedung dan Bangunan	287.997.000,-
3.	Jalan, irigasi dan jaringan	17.791.399.011,-
4.	Aset Tak Berwujud	129.789.000,-
Total		20.705.358.791,-

Jumlah Aset yang dihapus tahun 2025 sebesar Rp 554.500.166,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima ratus Ribu Seratus Enam Puluh enam Rupiah) yang terdiri dari:

- 1. Peralatan dan Mesin Rp 250.997.510

Total Aset tahun 2025 sebesar Rp. 236.421.311.114,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Serratus Empat Belas Rupiah) terdiri dari :

- 1. Persediaan Rp 937.825.891,-
- 2. Tanah Rp 4.025.200.000,-
- 3. Peralatan dan Mesin Rp 30.217.118.352,-
- 3. Gedung dan Bangunan Rp. 15.278.493.497,-
- 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 182.171.325.947,-
- 5. Aset Tetap lainnya Rp. 2.816.767.252,-
- 6. Aset Lainnya (ATB) Rp. 1.513.588.890,-
- TOTAL ASET Rp. 236.421.311.114,-**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul mengubah sebagian Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Angkutan
4. Bidang Lalu Lintas
5. Bidang Perlengkapan Jalan
6. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Sarana dan Pendukung Kegiatan Administrasi dan Operasional

Pendukung Kegiatan Administrasi

Pegawai ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

1. PNS sejumlah 44 pegawai
2. PPPK Penuh waktu sejumlah 9 pegawai
3. PPPK Paruh waktu sejumlah 54 pegawai

Jumlah Total pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 107 (empat puluh lima) orang. Selain pegawai ASN terdapat pegawai Outsourcing Perumda Aneka Dharma sejumlah 10 Pegawai.

6.2 Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Untuk melaksanakan kegiatan dinas utamanya kegiatan operasional dan untuk mencapai target kinerja yang optimal dibutuhkan

dukungan sarana dan prasarana. Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mobil operasional tertutup	:	6
Mobil operasional terbuka	:	3
Sepeda motor operasional	:	17
Sepeda motor patwal	:	3
Bus	:	1
Truk LPJU	:	2
Kamera	:	9
LCD	:	5
Laptop	:	25
Komputer	:	26
HT	:	49
Sepeda	:	3
Printer	:	31
AC	:	28
Genset	:	2
Kipas Angin	:	7
GPS	:	2
Kulkas	:	3
Mesin Fax	:	1
Mesin Fotocopy	:	1
Mesin ketik	:	2
Felt Bed	:	10
Alat Uji Emisi Bensin	:	2
Alat Uji Emisi Solar	:	2
Alat Timbang Portable	:	1
Deselometer	:	1
Megaphone	:	2
Speaker Aktif	:	2
Vacum Cleaner	:	2
Laser Distance Meter	:	1
Tenda Gazebo	:	5

Kursi Tamu	:	12
Kursi Putar Staf	:	47
Kursi Struktural Eselon III	:	3
Kursi Eselon IV	:	8
Kursi Pimpinan	:	1
Kursi Tunggu	:	8
Kursi Rapat	:	82
CCTV	:	2
Alat Pengangkat	:	1
Brake Tester	:	1
Kompresor	:	1
Dispenser	:	2
Rak Arsip	:	6
Tablet	:	1
Filling Cabinet	:	11
Finger Print	:	3
Televisi	:	4
Tabung APAR	:	6

6.3 Pencapaian Kinerja Non Keuangan

Beberapa pencapaian kinerja non keuangan yang dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul di tahun 2025 antara lain :

a. Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan daftar nominatif pegawai;
2. Penyusunan DUK (Daftar Urut Kepangkatan);
3. Pengusulan kenaikan pangkat pegawai;
4. Pembuatan kenaikan gaji berkala pegawai;
5. Pengusulan pensiun pegawai;
6. Pembuatan cuti pegawai;
7. Penyusunan Anjab, ABK, SKP.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan pengiriman diklat dan pelatihan teknik/Bimbingan teknis.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas yang sangat penting karena bagaimana pun beratnya apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan profesional akan menjadi terasa lebih ringan. Diklat yang diikuti tidak hanya diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya APBD tetapi juga diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan dengan biaya APBN.

c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.

Kegiatan ini berjalan dengan baik dengan adanya pelaksanaan administrasi persuratan dan pelaporan secara tertib dan tepat waktu.

d. Penyusunan rencana program kegiatan untuk tahun 2026.

Kegiatan ini berjalan lancar. Rencana dapat disusun tepat waktu baik untuk anggaran rutin maupun pendapatan. Rencana telah disetujui DPR untuk dilaksanakan tahun 2026.

e. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD tahun 2026.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD tahun 2026 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKA tahun 2026.

f. Wasdal penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai akhir tahun 2025. Telah diadakan pertemuan / sambung rasa dengan petugas parkir di seluruh Kabupaten Bantul baik parkir tepi jalan umum maupun parkir di tempat khusus parkir, dan telah dibentuk paguyuban petugas parkir. Sampai dengan akhir tahun telah dilaksanakan kegiatan wasdal sebanyak 263 (Dua ratus enam puluh tiga) kali.

g. Pelayanan perijinan bidang perhubungan.

Kegiatan ini berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti sampai dengan akhir tahun. Perijinan yang dilayani antara lain perijinan penyelenggaraan perparkiran yang sampai dengan akhir tahun telah dikeluarkan sebanyak 127 (Seratus dua puluh tujuh) ijin parkir terdiri dari 94 (Sembilan puluh empat) ijin parkir tepi jalan umum dan 33 (tiga puluh tiga) ijin parkir khusus.

BAB VII
PENUTUP

Demikian secara keseluruhan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang dapat kami sajikan. Tentunya dalam penyusunannya tidak lepas dari kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun - tahun berikutnya. Secara ringkas berikut kami sajikan perbandingan kondisi Tahun 2024 dan 2025 sbb:

	2024	2025
Pagu anggaran	Murni : 29.853.583.606 Penambahan : 4.639.970.647 Jumlah : 34.493.554.253	Murni : 37.661.050.131 Pengurangan : 996.168.131 Jumlah : 36.664.881.982
Rincian belanja	Operasi : 18.378.992.263 Modal : 16.114.561.990	Operasi : 14.553.767.898 Modal : 14.553.767.898
Komposisi program kegiatan dan penggunaan anggaran	Program : 2 program Kegiatan : 13 kegiatan Sub Kegiatan : 38 sub kegiatan Pelaksana : Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Perlengkapan Jalan, Bidang Angkutan, UPTD PKB	Program : 3 program Kegiatan : 14 kegiatan Sub Kegiatan : 41 sub kegiatan Pelaksana : Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Perlengkapan Jalan, Bidang Angkutan, UPTD KB
Personil	ASN : 44 orang PHL : 73 orang	ASN : 107 orang Outsourcing : 10 orang

Bantul, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL


SINGGIH RIYADI, S.E.,M.M
NIP. 197307211997031007

LAMPIRAN

1. Neraca TA. 2025
2. Laproan Realisasi Anggaran (LRA) TA. 2025
3. Laporan Operasional (LO) TA. 2025
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) TA. 2025